



GAPKI

NEWS



45th BERKONTRIBUSI
UNTUK NEGERI

Berkontribusi untuk Negeri

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa buletin *GAPKI News* edisi April 2026 dapat kami terbitkan sesuai dengan jadwal yang kami diharapkan. Kami juga sangat senang buletin ini dapat menemani aktivitas harian kita semua.

Perjalanan GAPKI selama 45 tahun telah mewarnai industri sawit di Indonesia. Bukan hanya perjalanan biasa, namun penuh dengan makna. Setiap langkah GAPKI menorehkan catatan positif dalam perkembangan industri sawit. Dengan komoditas ini, Indonesia tampil sebagai produsen sawit terbesar yang berpengaruh terhadap pasar minyak nabati dunia.

Peringatan HUT ke-45 GAPKI kami sajikan sebagai pengingat langkah panjang dan kontribusi besar GAPKI dalam pengembangan industri sawit di Indonesia. Peran GAPKI bukan sekadar tempat berkumpul pengusaha, namun sebagai wadah untuk memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara. Jejak GAPKI dapat dilihat dari harapan yang disampaikan oleh berbagai pihak agar industri ini terus tumbuh dan berkembang.

Selain tema ulang tahun, *GAPKI News* edisi April 2026 ini juga membahas tentang antisipasi penyakit busuk batang yang disebabkan oleh Ganoderma. Penyakit akibat jamur ini menjadi salah satu kendala besar bagi perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola oleh petani dan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Semoga pilihan tema pada edisi ini dapat menambah informasi dan wawasan kita semua. Terima kasih dan selamat membaca. ■

**Salam,
Redaksi GAPKI News**

GAPKI News

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Bandung Sahari

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Mochamad Husni
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Implementasi Kesetaraan Gender di Industri Sawit15

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Produksi Sawit Tahun 2025 Meningkat 7,18 Persen.....	4
GAPKI Terima Penghargaan dari Millers for Nutrition.....	5
45 Tahun Berkontribusi Untuk Negeri.....	6,7
Mengantisipasi Dampak Kemarau Panjang 2026.....	8
Memperkokoh Fondasi Industri Sawit Nasional.....	9
GAPKI Paparkan Tantangan Sawit Indonesia 2026 di Malaysia.....	10
Meningkatkan Pemahaman Jurnalis Tentang Program Biodiesel.....	11
Penanganan Ganoderma Harus Komprehensif.....	12,13
GAPKI Dorong Penguatan Jurnalistik Independen dan Obyektif.....	14



GAPKI Dukung Kegiatan
Sawit Berbagi Forwatan.....16



Merawat Tradisi
Buka Puasa Bersama.....17

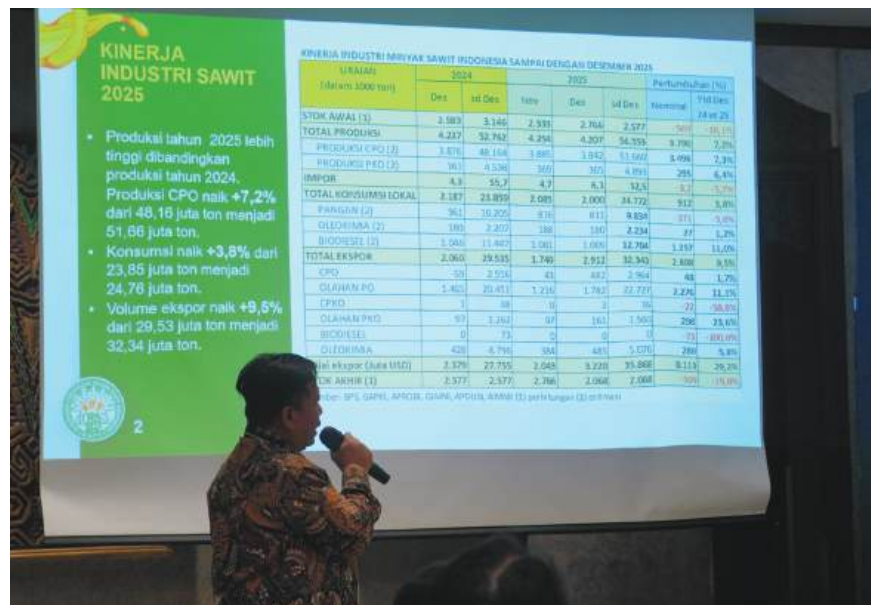
4Perayaan Sederhana Ulang Tahun GAPKI.....	18,19
Peningkatan PAD Harus Realistis, Sesuai Kondisi Lapangan.....	20
GAPKI Kalteng Perkuat Sinergi dengan Media.....	21
Soliditas Organisasi Jadi Fokus Program GAPKI Sumbar.....	22
GAPKI Riau Kembangkan Kapasitas SDM Bidang Kehumasan.....	23
Anwar Jibe Terpilih Sebagai Ketua GAPKI Bengkulu.....	24

PRODUKSI SAWIT TAHUN 2025 MENINGKAT 7,18 PERSEN

Total nilai ekspor sektor sawit tahun 2025 mencapai USD 35,87 miliar atau Rp 590 triliun.

Kinerja komoditas kelapa sawit sepanjang tahun 2025 cukup positif dengan peningkatan 7,26% dibandingkan dengan tahun 2024. Total produksi minyak sawit mentah atau CPO mencapai 51,66 juta ton, lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2024 sebesar 48,16 juta ton. Selain CPO, kenaikan produksi juga terjadi pada minyak inti sawit atau PKO yang meningkat 6,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi PKO selama 2025 mencapai 4,89 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,59 juta ton.

Peningkatan produksi CPO dan PKO menjadikan produksi sawit secara keseluruhan naik 7,18% dari 52,76 juta ton pada tahun 2024 menjadi 56,55 juta ton di tahun 2025. Peningkatan produksi tidak



lepas dari kondisi cuaca yang cukup baik di beberapa daerah dan harga yang cukup tinggi sehingga membuat petani semakin bersemangat merawat sawitnya. “Kondisi ini memotivasi petani untuk semakin merawat sawitnya,” kata Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng.

Selain produksi yang meningkat, konsumsi dalam negeri juga mengalami hal serupa. Kenaikan konsumsi mencapai 3,83% dari 23,85 juta ton di tahun 2024 menjadi 24,7 juta ton pada tahun 2025. Konsumsi terbesar untuk biodiesel naik menjadi 12,70 juta ton pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya sebesar 11,44 juta ton. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan bauran dari 35% menjadi 40%. Oleokimia juga naik dari 2,20 juta ton menjadi 2,23 juta ton. Namun, konsumsi pangan turun dari 10,20 juta ton menjadi 9,83 juta ton.

Menurut Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, tahun 2025 juga ditandai oleh kenaikan ekspor yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, total ekspor 29,53 juta ton dan pada tahun 2025 menjadi 32,34 juta ton. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan dari 20,45 juta ton

menjadi 22,72 juta ton. Ekspor minyak inti sawit juga naik menjadi 1,56 juta ton dari 1,26 juta ton. Adapun oleokimia naik menjadi 5,07 juta ton dari 4,79 juta ton.

Peningkatan ekspor sepanjang 2025 terjadi untuk tujuan sejumlah negara, antara lain Afrika (+991 ribu ton), China (+644 ribu ton), Malaysia (+516 ribu ton), Bangladesh (+503 ribu ton), dan Pakistan (+214 ribu ton). Sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan India (-859 ribu ton), Uni Eropa (-97 ribu ton) dan AS (-15 ribu ton). Total nilai ekspor sektor sawit pada tahun 2025 mencapai USD 35,87 miliar atau Rp 590 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar USD 27,76 miliar atau Rp 440 triliun.

Peningkatan nilai ekspor terjadi karena beberapa faktor, antara lain meningkatnya volume ekspor dan harga rata-rata cif Rotterdam tahun 2025 sebesar US\$ 1.221/ton lebih tinggi dari harga rata-rata tahun 2024 sebesar US\$ 1.084/ton.

Dengan produksi, konsumsi dan ekspor ini, stok akhir CPO dan PKO tahun 2025 sebesar 2,06 juta ton, lebih rendah 19,79% daripada stok akhir tahun 2024 sebesar 2,57 juta ton. ■

GAPKI TERIMA PENGHARGAAN DARI MILLERS FOR NUTRITION



Pelaku usaha minyak sawit dan minyak goreng memiliki kontribusi besar dalam program fortifikasi.

Koalisi global *Millers for Nutrition* memberikan apresiasi kepada GAPKI atas kontribusinya dalam memastikan ketahanan pangan melalui pemeliharaan rantai pasok minyak sawit nasional. Apresiasi ini diberikan dalam diskusi bertajuk *Cooking Oil Stakeholders: Strategic Networking Lunch* yang diadakan oleh *Millers for Nutrition* dan mitra riset TransGraph di Jakarta, 4 Februari 2026.

Apresiasi serupa juga diberikan kepada GIMNI dan AIMMI atas konsistennya menerapkan program fortifikasi vitamin A. Penyerahan penghargaan kepada tiga asosiasi ini dilakukan oleh Program Leader (Asia) *Miller For Nutrition-Technoserve*, Monojit Indra. Menurut Indra, ketiga asosiasi ini dinilai berperan signifikan dalam memastikan fortifikasi minyak goreng dapat terjangkau oleh keluarga di seluruh Indonesia.

Diskusi yang dihadiri pelaku industri sawit dan minyak goreng ini dirancang sebagai *platform* untuk menyelaraskan pandangan tentang tantangan ketahanan pangan dan mandat nutrisi nasional. *Platform* ini juga menegaskan kembali komitmen

industri sawit dan minyak goreng dalam memastikan minyak goreng terfortifikasi berkualitas tinggi sebagai standar kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh rumah tangga di Indonesia.

Millers for Nutrition adalah koalisi global yang berdedikasi menjadikan fortifikasi pangan sebagai norma lintas industri. Di Indonesia, inisiatif ini diimplementasikan oleh TechnoServe dan TransGraph. "Program kami ada di delapan negara, empat di Afrika dan empat di Asia termasuk di Indonesia," kata Indra.

Koalisi ini bekerja sama dengan pelaku usaha, terutama usaha penggilingan dan *refinery* dalam menyediakan pangan terfortifikasi berkualitas tinggi untuk masyarakat.

Menurut Indra, pelaku usaha minyak sawit dan minyak goreng memiliki kontribusi besar dalam program fortifikasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah dinilai berdampak besar terhadap kelangsung industri ini dalam program fortifikasi. Dedikasi industri ini terhadap fortifikasi menjadi aspek vital dalam peningkatan ketahanan gizi bangsa. Salah satu yang mendapatkan perhatian adalah transisi dari minyak curah ke minyak kemasan yang higienis, terjangkau, dan kaya nutrisi.

Sebagai komunitas global pengolah makanan pokok, koalisi ini memberdayakan para *millers*, memberikan pelatihan teknis khusus, pengujian produk, dan dukungan bisnis pada anggota.

Tujuannya untuk memastikan fortifikasi berdampak positif bagi kesehatan masyarakat dan berkelanjutan secara komersial. Apalagi hasil riset lapangan TransGraph pada 2024 - 2025 memberikan wawasan pemetaan produksi, dinamika rantai pasok dan efikasi fortifikasi yang menekankan standar Vitamin A sebagai pilar dasar kesehatan nasional. ■



45 TAHUN BERKONTRIBUTUSI UNTUK NEGERI



GAPKI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah sejak awal pendiriannya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah menorehkan tinta emas dalam perkembangan industri sawit di negeri ini. Sejak didirikan di Medan pada 27 Februari 1981, GAPKI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi Indonesia menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ketika GAPKI berdiri, produksi minyak sawit Indonesia masih 822 ribu ton. Sedangkan Malaysia sudah memproduksi 3,3 juta ton dengan lahan yang lebih terbatas. Bibit sawit yang dikembangkan di Malaysia ternyata berasal dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang sedang menerapkan *agro-based industrialization* untuk sawit, kelapa, kakao, dan teh berpacu mengejar ketertinggalan. Strateginya melibatkan pengusaha swasta melalui program Perusahaan Besar Swaswa Nasional (PSBN) pada dekade 1970-an. Inilah langkah krusial yang menjadi pijakan lahirnya kemitraan perkebunan inti rakyat (PIR) dan peningkatan produksi yang membuat ekspor CPO terus meningkat. Namun, kebutuhan domestik untuk minyak goreng yang naik membuat pemerintah meminta

pengusaha sawit memprioritaskan pasar dalam negeri.

Situasi yang dihadapi oleh pengusaha sawit ini menjadi babak penting pendirian GAPKI yang terekam dalam buku *45 Tahun GAPKI Untuk Negeri Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045* yang diterbitkan oleh GAPKI pada April 2026. Kepada pengusaha sawit, Menteri Riset & Teknologi Soemitro Djojohadikusumo (1978-1983) mendorong pentingnya pembentukan asosiasi industri sawit. Alasannya, dialog dengan para pemangku kepentingan akan lebih kuat dan terlegitimasi jika dilakukan secara kolektif untuk mengatasi masalah perkelapasawitan. Pengembangan industri sawit tidak mungkin dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri.

Dengan prinsip ini, GAPKI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah sejak awal pendiriannya. Wadah pengusaha sawit ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, namun juga pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Sejarah GAPKI adalah sejarah kemitraan strategis dengan



pemerintah dalam membangun industri sawit nasional yang tangguh, berkelanjutan, serta kontributif terhadap perekonomian nasional dan pengentasan kemiskinan,” kata Ketua Dewan Pembina GAPKI Joe fly J. Bahroeny.

Kehadiran GAPKI semakin terasa ketika pemerintah menerbitkan peraturan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng melalui mekanisme *Domestic Market Obligation* (DMO). Sebagai wadah pengusaha sawit, GAPKI mematuhi kebijakan ini sehingga pasokan minyak sawit dan produk turunannya terjamin untuk kebutuhan dalam negeri. Salah satu periode paling krusial terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Kepatuhan pengusaha sawit berperan besar membuat harga minyak goreng stabil.

Perkembangan industri sawit yang masif tentunya tidak lepas dari peranan para pengusaha yang tidak Lelah berjuang. Dinamika terkait kebijakan pemerintah dipandang sebagai proses untuk penguatan industri. Karena itu, GAPKI terus mendorong kepastian hukum agar

iklim investasi menarik bagi investor. “Dunia usaha dapat berkembang apabila didukung oleh kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta iklim investasi yang kondusif,” kata Joe fly J. Bahroeny. Karena itu, dialog konstruktif dengan pemerintah terus dibangun oleh GAPKI.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, hubungan yang erat dengan pemerintah tidak selalu berarti tanpa perbedaan pandangan. Sebab, terdapat kebijakan yang perlu diapresiasi karena mendukung produktivitas, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Tapi, ada pula regulasi yang perlu masukan konstruktif karena berpotensi merugikan kepentingan pelaku usaha atau melemahkan daya saing Indonesia di pasar global. “GAPKI memberi kritik yang objektif dan berbasis data, tanpa tendensi melawan pemerintah,” katanya.

Kemitraan strategis GAPKI dan pemerintah ini berperan besar dalam perkembangan industri sawit di Indonesia. Peranan yang dijalankan GAPKI bukan sekadar modernisasi perkebunan, namun juga diplomasi dagang dan membangun jaringan global. Partisipasi GAPKI dalam forum dunia dimulai pada periode 1990-an untuk menyuarakan aspirasi Indonesia tentang *standard* mutu produk, mekanisme perdagangan dan isu teknis yang mempengaruhi arus ekspor minyak sawit dunia.

Peranan GAPKI di forum internasional berkontribusi signifikan terhadap posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Peranan Indonesia dalam industri minyak nabati dunia semakin kokoh.

Layaknya pohon yang semakin besar, angin yang menerpa juga makin kencang.

Industri sawit Indonesia mulai menghadapi tantangan besar yang terkait dengan isu keberlanjutan. Apalagi setelah Uni Eropa merilis kebijakan EUDR. Bersama pemerintah, GAPKI melakukan diplomasi untuk mencari titik temu tentang regulasi EUDR yang tidak adil.

Sejalan dengan perkembangan terkini, sawit bukan sekadar komoditas strategis, tapi telah bertransformasi menjadi aset strategis nasional. Komoditas sawit menjadi bagian penting dari program ketahanan pangan dan energi. Sawit adalah tulang punggung swasembada energi karena dapat dikonversi menjadi bahan bakar nabati. Bersama pemerintah, GAPKI berkontribusi penting dalam inovasi energi terbarukan melalui program bauran solar dan minyak sawit. Banyak inovasi tentang sawit yang berawal dari usulan GAPKI.

Menurut Eddy Martono, sawit adalah salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Kontribusinya tecermin melalui perolehan devisa ekspor, penciptaan lapangan kerja untuk jutaan orang secara langsung dan tidak langsung, serta peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Komoditas sawit mampu menjadi bantalan ekonomi Indonesia, baik pada masa krisis keuangan, pandemi, maupun ketika terjadi perlambatan perdagangan dunia,” katanya.

Besarnya kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari nilai ekspor setiap tahun. Sebagai

contoh, sepanjang tahun 2025, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35 miliar atau setara Rp 591,8 triliun. Dalam paparan GAPKI, total ekspor minyak sawit tahun 2025 mencapai 32 juta ton. Sedangkan produksi sawit sebanyak 51,6 juta ton. Tingkat produksi ini adalah lompatan besar apabila melihat kembali kemampuan produksi sawit Indonesia pada tahun 1981 yang hanya 822 ribu ton.

Menurut Eddy Martono, GAPKI akan terus berperan menjadikan sawit sebagai lokomotif kemajuan Indonesia. Apalagi pemerintah menargetkan produksi 100 juta ton sawit pada tahun 2045, ketika Indonesia merayakan Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan target besar ini, GAPKI mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terdegradasi sebagai kebun sawit khusus untuk energi. Dengan cara ini, pengembangan industri sawit tetap dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Selain itu, GAPKI telah memulai langkah penting dalam peningkatan produktivitas sawit melalui pelepasan tiga serangga penyerbuk dari Tanzania bersama BPDP, Kementerian Pertanian, PT RPN, konsorsium Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia (PIPPSI), dan Badan Karantina Indonesia. Langkah-langkah strategis yang diambil GAPKI selama 45 tahun kehadirannya ini bertujuan menjadikan komoditas sawit sebagai salah satu tulang punggung perekonomian bangsa menuju Indonesia Emas 2045. ■



MENGANTISIPASI DAMPAK KEMARAU PANJANG 2026

Seluruh daerah sentra sawit akan terdampak kemarau panjang dengan tingkat risiko yang berbeda-beda.

Musim kemarau yang diprediksi lebih awal dan lebih panjang tahun 2026 ini mendorong industri sawit memberikan perhatian lebih besar. Apalagi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli-September 2026 merupakan fase kritis yang mempengaruhi produktivitas tanaman. “Kemarau tahun ini diprediksi datang lebih awal dan lebih kering,” kata Deputy Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan pada kegiatan Ngobrol Bareng GAPKI bersama Peneliti Madya PPKS Nuzul Hijri Darlan di kantor GAPKI Jakarta pada 7 April 2026.

Kegiatan yang dipandu oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono ini diikuti oleh anggota GAPKI secara *daring*. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pola cuaca sebagai panduan bagi industri sawit. Apalagi GAPKI telah mengirim surat kepada semua anggotanya pada 13 Maret 2026 untuk mengantisipasi dampak kemarau, terutama ancaman karhutla. Kolaborasi perusahaan, pemerintah, dan para petani diharapkan dapat mencegah karhutla. “Goal kita tidak ada kebakaran di kebun dan lahan,” kata Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng dalam sambutan *Ngobrol Bareng GAPKI ke-55* ini.

Prediksi BMKG akan menjadi panduan bagi industri sawit dalam mitigasi risiko hingga adaptasi strategi operasional di lapangan. Dengan

informasi yang valid dan komprehensif dari BMKG, industri sawit dapat beroperasi secara maksimal sehingga produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Termasuk kebutuhan untuk biodiesel B50 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2026. “Dibutuhkan tambahan 2 juta ton minyak sawit untuk B50 yang dimulai 1 Juli 2026 nanti,” katanya. Hal ini menjadi tantangan industri sawit di tengah kemarau panjang dan permintaan minyak sawit yang meningkat.

Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, seluruh daerah sentra sawit akan terdampak kemarau panjang dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. “Tergantung pola hujan, tipe lahan dan kerentanan kekeringan,” katanya. Untuk area Sumatera, Provinsi Riau dan Sumatera Selatan perlu diperhatikan karena punya historis *hotspot* risiko kebakaran dan penurunan produksi. Sedangkan di Kalimantan, perhatian ditujukan untuk Kalimantan Barat dan Tengah sebagai wilayah paling kritis. Pada puncak kemarau, yakni Juli-September 2026 daerah ini sangat rawan karhutla karena didominasi lahan gambut di sebagian besar wilayahnya.

Selama kemarau panjang, ketersediaan air menjadi tantangan besar. Kekurangan air akan memicu dampak panjang bagi produktivitas sawit. Dampak kemarau tidak terjadi seketika, namun mengikuti siklus biologis pembentukan buah selama 24 bulan. Hindrasi tanaman pada 0-6 bulan menyebabkan buah kekurangan air sehingga bobot TBS ringan. Apabila tidak ditangani dengan baik, kemarau panjang memicu penurunan produksi. “Kekeringan akibat El Nino tahun 2015 menurunkan produksi hingga 6-60%,” kata Nuzul Hijri Darlan.

Menurut Nurul Hijri Darlan, beberapa tindakan preventif selama kemarau panjang yang bisa dilakukan antara lain membuat bangunan konservasi berupa rokak dan guludan. Tujuannya adalah mempertahankan kelembaban tanah lebih lama selama kekeringan ekstrim, tidak hanya pada areal dengan topografi berat. Selain itu, serasah juga dapat dimanfaatkan untuk guludan penahan erosi. “Pemupukan, terutama pupuk Kalium sudah harus selesai pada semester satu,” katanya. Lahan yang cukup hara lebih toleran terhadap keterbatasan air sehingga pertumbuhan tanaman tetap terjaga. ■

MEMPERKOKOH FONDASI INDUSTRI SAWIT NASIONAL

“Kami mencermati hambatan utama bukan pada desain kebijakan, melainkan pada tata kelola.”

Tantangan yang dihadapi industri sawit tidak pernah berhenti. Selalu datang silih berganti, baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan industri andalan ekspor nonmigas Indonesia ini bersifat struktural dan lintas sektor, mulai dari masalah kelembagaan, regulasi, hingga implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk *Reshaping Indonesia's Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and Governance Standards* yang diadakan oleh Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta pada 5 Februari 2026.

Pemateri diskusi terdiri dari akademisi, pengamat kebijakan, hingga praktisi industri sawit. GAPKI diwakili oleh Direktur Eksekutif Mukti Sardjono yang dipercaya menjadi pembicara tentang kondisi terkini industri sawit nasional. Akademisi sawit Witjaksana Darmosarkoro, Chief of Staff PalmCo Rizalmi Fitrah ZA dan



Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, membahas komoditas sawit dari perspektif berbeda.

Forum ini membahas penguatan fondasi industri sawit nasional di tengah peningkatan risiko perubahan iklim dan tuntutan standar tata kelola baru. Hal ini sangat penting karena sawit berperan strategis sebagai penopang ekonomi nasional. Dibutuhkan kebijakan yang adaptif, berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir guna menjaga daya saing jangka panjang serta mendukung ketahanan pangan dan energi Indonesia.

“Kami mencermati hambatan utama bukan pada desain kebijakan, melainkan pada tata kelola. Fragmentasi kelembagaan, birokrasi yang panjang, hingga dinamika regulasi yang tinggi kerap menghambat implementasi kebijakan,” ujar Piter Abdullah. Hal ini bisa terjadi karena tata kelola yang belum terintegrasi pada lembaga khusus.

Apakah industri sawit mampu memenuhi tuntutan global? Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono menegaskan pelaku usaha Indonesia

pada dasarnya mampu memenuhi tuntutan pasar global. “Standar global dapat dipenuhi. Tantangan terbesar sawit justru regulasi dan kelembagaan dalam negeri yang belum sepenuhnya sinkron,” katanya. Sampai saat ini, ada 34 lembaga yang terlibat dalam urusan sawit yang menyebabkan tumpang tindih peraturan.

Kesiapan industri sawit nasional, terutama dari sisi operasional, untuk memenuhi tuntutan pasar global juga disampaikan oleh Chief of Staff PalmCo, Rizalmi Fitrah ZA. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan kepastian hukum dan kelembagaan yang solid. Program keberlanjutan dan peningkatan produktivitas perusahaan banyak yang sudah siap, namun implementasinya belum maksimal karena legalitas lahan dan kelembagaan petani.

Menurut akademisi sawit, Witjaksana Darmosarkoro, tata kelola juga berdampak langsung terhadap daya saing industri. Perbaikan dapat dilakukan pada struktur petani sawit. Selama ini, struktur petani sawit Indonesia didominasi oleh UKMK dengan keterbatasan pengetahuan dan akses. Karena itu, pola pembinaan perlu dibenahi agar pendampingan dapat merata.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa pembenahan tata kelola mutlak dilakukan karena industri sawit Indonesia mendominasi 58,7 persen produksi CPO global, menopang 2,6 juta petani sawit, melibatkan 16,5 juta tenaga kerja di 325 kabupaten dan 25 provinsi. Total output industri ini mencapai Rp 1.119 triliun dengan nilai tambah Rp 510 triliun per tahun sehingga berperan penting dalam menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia. ■



GAPKI PAPARKAN TANTANGAN SAWIT INDONESIA 2026 DI MALAYSIA

Untuk tahun 2026, harga diprediksi tinggi namun di bawah harga tahun 2025.

Masa depan industri sawit dari berbagai sudut pandang menjadi topik utama pembahasan dalam 37th *Palm and Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition* atau POC 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9-11 Februari 2026. Konferensi tahunan pelaku industri sawit Malaysia ini juga dihadiri akademisi, peneliti dan analis, pelaku bisnis industri sawit dari berbagai negara. GAPKI dipercaya menjadi salah satu pematari dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Bursa Derivatif Malaysia ini.

Bagi pelaku industri sawit Malaysia, konferensi ini sangat penting untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Apalagi produksi sawit Malaysia untuk pertama kali mencapai 20,28 juta ton pada tahun 2025. “Ini rekor tertinggi dalam sejarah, untuk pertama kalinya produksi melampaui 20 juta ton,” kata Menteri Pertanian dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Noraini Ahmad. Total ekspor produk sawit dan produk berbasis sawit juga meningkat menjadi RM 112,51 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar RM 109,3 miliar.

Peningkatan kinerja sektor sawit juga dibahas oleh Ketua Bidang Luar

Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan yang memaparkan makalah berjudul *Indonesia Palm Oil Industry 2026: Navigating Uncertainty*. Sepanjang tahun 2025, produksi CPO naik 8% dibandingkan dengan 2024. Begitu juga dengan ekspor yang meningkat 8,7% dari 29,535 juta ton menjadi 32,115 juta ton. Konsumsi domestik naik 3,8% dari 23,859 juta ton menjadi 24,761 juta ton. Peningkatan konsumsi domestik didorong, terutama oleh program B40.

Seiring dengan rencana peningkatan bauran minyak nabati dan bahan bakar fosil jenis solar dari 40% menjadi 50% atau B50, ada implikasi yang dihadapi industri sawit. “Mandat biofuel membuat kebijakan domestik menjadi *shock absorber* volatilitas harga global,” kata Fadhil Hasan. Ada potensi kondisi ketidakpastian yang dihadapi industri sawit karena peningkatan permintaan domestik, namun produksi masih stagnan. *Rebalancing* permintaan akan terjadi, antara lain porsi ekspor turun dari 71% pada tahun 2016 menjadi sekitar 56% di tahun 2025.

Selain itu, industri sawit Indonesia juga mengalami tekanan eksternal dan kepatuhan yang berdampak terhadap risiko pasar dan biaya

kepatuhan yang tidak merata. “Pasar Uni Eropa tentu sangat penting. Namun, biasanya regulasinya menjadi yang tertinggi,” katanya. Hal ini terkait dengan kebijakan EUDR yang salah satunya mewajibkan ketertelusuran (*traceability*) bahan baku minyak sawit yang akan dipasarkan. Sedangkan pasar berkembang cenderung memiliki biaya kepatuhan lebih rendah.

Menurut Fadhil Hasan, untuk tahun 2026 pertumbuhan sektor sawit di Indonesia diprediksi melambat sekitar 2% - 3% karena berbagai faktor. Selain karena sebagian tanaman berusia tua, peremajaan tanaman sawit belum mencapai target. Untuk tahun 2026, harga diprediksi tinggi namun di bawah harga tahun 2025. Apabila pasokan musiman rendah, penyesuaian stok serta adanya dukungan kebijakan biodiesel, harga CPO tahun 2026 diperkirakan RM 4.100 – 4.400 per ton. Tapi, jika panen meningkat, kompetisi minyak nabati lain makin tinggi dan ada potensi ambiguitas kebijakan, harga CPO diperkirakan RM 4.000–4.300/ton.

Fadhil Hasan mengatakan proyeksi ini bisa saja berubah karena sejumlah faktor, antara lain kondisi geopolitik dan harga minyak mentah dunia. Begitu juga dengan perubahan pajak hingga kuota ekspor dapat mengubah proyeksi. Karena itu, navigasi risiko bergantung pada koherensi kebijakan, produktivitas, kredibilitas keberlanjutan, hingga efisiensi biaya. ■



MENINGKATKAN PEMAHAMAN JURNALIS TENTANG PROGRAM BIODIESEL

GAPKI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kesiapan industri dan hasil riset yang komprehensif.

Program biodiesel bukan sekadar bauran minyak nabati dengan bahan bakar berbasis fosil. Ada banyak aspek yang harus dipahami secara utuh, terutama oleh jurnalis sebagai sarana komunikasi kepada publik. Karena itu, GAPKI mendukung *Workshop Jurnalis Program Biodiesel 2026* yang diadakan oleh Majalah Sawit Indonesia dan BPDP di Depok, 5 Februari 2026. “Secara prinsip, GAPKI mendukung program biodiesel” kata Mochamad Husni, Komp. Media Relations GAPKI.

GAPKI mendukung program biodiesel sebagai strategi ketahanan energi nasional. Apalagi program ini sudah berjalan sejak 2015 secara bertahap. Program biodiesel dilakukan melalui kebijakan mandatori yang mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak jenis solar.

Di tahun 2015, implementasi program ini dimulai dengan B15 yang diterapkan pada sektor *Public Service Obligation* (PSO). Kebijakan bauran minyak nabati terus ditingkatkan hingga tahap B40 sekarang dan sedang persiapan menuju B50 bahkan B60 untuk menekan impor BBM. Presiden Prabowo mendukung penuh program ini untuk swasembada energi.

Agar program strategis ini sukses, GAPKI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kesiapan industri dan sejumlah hasil riset yang komprehensif.

Apalagi industri sawit sedang menghadapi tantangan produktivitas, kenaikan konsumsi dalam negeri, dan ekspor. Dalam lima tahun



terakhir, produktivitas sawit stagnan, bahkan menurun. Karena itu, GAPKI tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan produktivitas sawit seperti mendukung program PSR. Selain itu, GAPKI juga menyiapkan langkah lainnya.

“GAPKI akan melepaskan serangan penyerbuk dari Tanzania,” katanya. Langkah intensifikasi ini dilakukan karena serangan penyerbuk yang ada sudah menurun efektivitasnya, terutama pada musim hujan. Serangga penyerbuk berperan penting dalam proses pembuahan sawit.

Pengembangan serangan dari Tanzania ini dilakukan oleh GAPKI bekerjasama dengan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan), PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), Kementerian Pertanian, dan pihak lainnya.

Peningkatan produksi menjadi kebutuhan mendesak industri sawit supaya dapat memenuhi konsumsi

dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Dengan produksi sawit sekarang, kebutuhan dalam dan luar negeri masih sama-sama terpenuhi. Apabila bauran minyak nabati dinaikkan menjadi B50, maka kebutuhan dalam negeri minyak sawit pasti meningkat. Tanpa adanya peningkatan produksi sawit, dikhawatirkan ekspor terganggu yang berdampak terhadap penerimaan negara dari PHE sebagai sumber pendanaan PSR untuk petani melalui BPDP.

Menurut Mochamad Husni, program PSR berhasil karena tanaman sawit petani banyak yang berusia tua sehingga produktivitasnya menurun. Semakin cepat *replanting* dilakukan, maka semakin cepat peluang industri sawit meningkatkan produksinya. Apalagi setelah serangan penyerbuk dilepas di area perkebunan untuk menggantikan serangan lama secara bertahap sehingga pembuahan sawit lebih maksimal. ■



PENANGANAN GANODERMA HARUS KOMPREHENSIF

“Pengendalian Ganoderma tidak cukup hanya dengan tindakan kuratif di tingkat tanaman.”

Di tengah upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia, komoditas ini justru menghadapi ancaman serius dari serangan penyakit busuk pangkal batang akibat *Ganoderma boninense*. Serangannya menurunkan produktivitas tanaman dan membuat tanaman sawit mati. *Ganoderma boninense* diperkirakan menginfeksi 4,9 juta hektar perkebunan sawit di Indonesia. Bahkan, sawit hasil replanting di usia muda terinfeksi penyakit mematikan ini.

“Apabila tidak dikendalikan, produktivitas sawit menurun dan dalam skenario terburuk, sawit terancam punah pada 2050,” kata Indra Syahputra selaku Ketua Konsorsium Ganoderma Indonesia/ GAPKI dalam 3rd *International Symposium Ganoderma* (ISGANO) 2026 di Medan pada 10-12 Februari 2026. Simposium ini menghadirkan pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk mencari solusi penanganan Ganoderma secara komprehensif dan tidak parsial.

Pengendalian Ganoderma harus terpadu yang dimulai dari deteksi dini, sanitasi sumber inokulum, pengelolaan lahan ketika replanting,

hingga penerapan praktik budidaya terbaik (*best management practices*). Salah satu strategi penting adalah penggunaan tanaman sawit yang toleran atau moderat resisten Ganoderma. Tanaman yang tahan Ganoderma bukan berarti bebas dari patogen ini. “Serangannya lebih rendah dan lebih lambat. Ini peluang bagi kebun untuk tetap produktif lebih lama,” katanya.

Untuk mendapatkan tanaman resisten Ganoderma diperlukan deteksi dini (*early screening test*) dari berbagai varietas pada fase pembibitan. Tujuannya menyeleksi material tanaman yang memiliki daya tahan lebih baik. Peningkatan ketahanan tanaman dilakukan melalui pendekatan genetik, termasuk pemanfaatan DNA *marker* maupun metode seleksi berbasis genetik. “Peningkatan kapasitas produksi bibit dan peningkatan level ketahanan tanaman ini menjadi strategi di masa depan,” katanya.

Menurut Indra Syahputra, sebanyak tujuh perusahaan benih telah memproduksi bibit sawit tahan Ganoderma. Total kapasitas produksi sebanyak 17 juta bibit dengan 10 varietas. Hal ini menjadi modal

penting untuk pengembangan bibit resisten Ganoderma. Selain itu, penting juga membangun database Ganoderma nasional yang mudah diakses dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pengendalian penyakit ini. “Tanpa data yang akurat kita sulit bergerak cepat,” katanya.

Selain itu, pengendalian Ganoderma juga harus dimulai dari proses pengolahan tanah secara menyeluruh. “Pengendalian Ganoderma tidak cukup hanya dengan tindakan kuratif di tingkat tanaman,” kata Prof. Abdul Rauf, guru besar ilmu tanah Universitas Sumatera Utara. Pengendalian Ganoderma berbasis tanah bertumpu pada tiga pilar, yakni sanitasi mekanis, perbaikan karakteristik tanah, dan peningkatan mikroba antagonis di dalam tanah.

Menurut Prof. Rauf, sanitasi ketika replanting harus diperhatikan karena spora Ganoderma dapat bertahan pada tunggul dan sisa akar tanaman sebelumnya sehingga menjadi sumber infeksi pada generasi tanam berikutnya. Apabila sisa tanaman ini tidak dibersihkan dengan benar, serangan bisa berulang pada generasi ketiga bahkan kelima. “Bongkar

tunggul dan sisa akar yang terinfeksi,” katanya. Lalu, dicincang, dirumpuk, dan dibenamkan khususnya pada lahan gambut dengan sistem dua baris satu rumpuk.

Untuk menutup jaringan terinfeksi dan menghambat serangan lanjutan, pembumbunan tanah (*soil earthing*) harus dilakukan pada pangkal batang. Pada tanaman yang terinfeksi, harus dibuatkan parit isolasi di sekeliling tanaman sakit untuk memutus kontak akar dengan tanaman sehat. “Metode ini lebih efektif apabila dikombinasikan dengan aplikasi sulfur,” katanya.

Untuk lahan gambut, sistem tanam *big hole* yakni membuat lubang berukuran besar yang diisi kompos sebagai tindakan preventif. Kompos bertujuan untuk meningkatkan kesuburan, memperbaiki kapasitas menahan air, dan membantu memutus rantai perkembangan Ganoderma. “Ingat, tidak semua Ganoderma bersifat patogen. Ada yang berperan sebagai dekomposer atau sekadar organisme *saprophyte*,” katanya. Karena itu, pengelolaan lingkungan tanah menjadi faktor penentu apakah jamur berkembang sebagai parasit atau tidak.

Menurut Prof. Abdul Rauf, Ganoderma umumnya berkembang optimal pada tanah dengan pH 3,7 – 5,0. Untuk menekan pertumbuhan spora Ganoderma, pH tanah harus ditingkatkan hingga di atas 6,0 melalui pemberian 8-10 kg kapur atau dolomit per lubang tanam. “Aspek kimia tanah melalui pengaturan pH ini adalah langkah krusial,” katanya. Pengelolaan pH tanah juga diimbangi dengan kecukupan unsur hara terutama *Magnesium* (Mg) dan *Kalium* (K) untuk menghambat perkembangan Ganoderma di lapangan.

Selain itu, aplikasi agen hayati seperti *Trichoderma sp.* atau *Gliocladium* bisa dilakukan pada tanah sekitar perakaran. *Trichoderma sp* berfungsi menguasai ruang tumbuh jamur dan bersaing dengan Ganoderma. “Penggunaan mikoriza sebagai pupuk hayati juga disarankan,” katanya. Dosisnya dimulai dari 50 gram pada bibit, 100–500 gram saat penanaman di lahan, 200 gram pada TBM, dan 500 gram pada tanaman menghasilkan di bawah 10 tahun.



Dari Mana Ganoderma Berasal?

- Ganoderma merupakan jamur dalam keluarga *Ganodermataceae* yang ditemukan oleh Finlandia Elias Magnus Fries di abad ke-19. Jumlahnya mencapai 80 spesies. Dari berbagai spesies, *Ganoderma boninense* paling berbahaya karena kemampuannya bertahan lama dalam tanah dan menginfeksi lintas generasi tanaman.
- Ganoderma menyerang kelapa sawit pertama kali di Kongo pada 1915. Lalu teridentifikasi di Asia Tenggara pada tahun 1930-an. Serangan makin masif di Indonesia teridentifikasi pada tahun 1953. Saat ini, 4,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia terserang Ganoderma. Salah satunya kebun sawit PalmCo di mana 80% kematian sawit disebabkan oleh Ganoderma.
- “Sebanyak 860.533 pohon di kebun PalmCo terinfeksi dalam berbagai tingkat serangan dari ringan hingga berat,” kata Abdul Muthalib yang mewakili Direktur Utama PalmCo dalam simposium internasional Ganoderma di Medan. Selain Indonesia, Ganoderma menyerang kebun sawit di Malaysia.
- Kerugian Malaysia diprediksi mencapai USD 500 juta per tahun. Apabila penyakit ini tidak dimitigasi dengan serius, 41% lahan sawit di seluruh dunia terancam oleh penyakit mematikan ini pada tahun 2050. “Ganoderma berpotensi memicu krisis ekonomi kalau tidak dikendalikan secara serius,” katanya.



“Kita tidak hanya mengobati tanaman sakit, tetapi juga memperbaiki ekosistem tanah,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, Ganoderma bukan penyakit biasa, tapi silent killer yang merusak tanaman dan mencerminkan degradasi kesehatan tanah. “Kalau tidak ditangani serius, pada 2050 sawit kita bisa habis,” katanya. Karena itu, penanganan Ganoderma harus komprehensif, lintas sektor, dan berbasis sains. Namun, Indonesia belum memiliki kebijakan nasional khusus untuk pengendalian Ganoderma seperti flu burung atau organisme pengganggu tanaman

pangan yang dilengkapi dengan protokol biosekuriti.

Biosekuriti Ganoderma sudah mendesak dan sangat diperlukan sehingga siapa yang berperan di tahap pencegahan dan di tahap pengendalian akan jelas. Apalagi masalah ini menyangkut banyak pihak yakni pemerintah pusat dan daerah, karantina pelabuhan, hingga dunia usaha. Karena itu, Tungko Sipayung mengusulkan agar kebijakan pengendalian ganoderma diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) mengingat cakupannya lintas kementerian dan pemerintah daerah. ■

GAPKI DORONG PENGUATAN JURNALISTIK INDEPENDEN DAN OBYEKTIF



“Sehingga ruang publik dapat diisi dengan diskursus yang konstruktif dan berbasis data.”

Industri pers menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan GAPKI sebagai jembatan komunikasi antara industri sawit dengan publik. Sinergi keduanya selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman. Kerja sama sinergis antara keduanya kembali diperkuat melalui penandatanganan MoU antara Dewan Pers dengan GAPKI, PT Astra Agro Lestari Tbk, dan PT Artha Graha Peduli di sela-sela Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten pada 9 Februari 2026.

Perayaan HPN 2026 dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto yang diwakili oleh Menko PKM Muhaimin Iskandar. Sejumlah menteri, pimpinan MPR, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir, serta 1.000 wartawan lebih dari seluruh Indonesia, termasuk 10 wartawan dari Papua, menghadiri perayaan ini.

Kerja sama yang disepakati antara pers dan GAPKI terkait penguatan ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan. “GAPKI mendukung langkah-langkah untuk penguatan ekosistem pers nasional,” kata Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng. GAPKI mendorong media menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, berdasarkan

kode etik, mengedepankan verifikasi dan informasi yang seimbang, terutama dalam isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan publik.

Menurut M. Hadi Sugeng, kehadiran GAPKI dalam perayaan HPN merupakan dukungan dan penghormatan terhadap dunia pers atas kontribusinya kepada industri sawit. Kepercayaan industri kepada dunia pers merupakan penanda demokrasi yang terus tumbuh di republik ini, di mana pendapat, aspirasi, dan suara publik dapat tersalurkan. “Bagi GAPKI, pers adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” katanya.

Di tengah disrupsi industri dan banjir informasi, GAPKI mengajak PWI dan seluruh insan pers meningkatkan praktik jurnalistik yang independen dan objektif. Informasi yang akurat, valid, dan utuh serta proporsional akan membantu masyarakat memahami berbagai persoalan secara jernih, tanpa stigma atau generalisasi berlebihan. Karena itu, dialog terbuka dengan pers perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan iklim komunikasi yang sehat. “Sehingga ruang publik dapat diisi dengan diskursus yang konstruktif dan berbasis data,” katanya.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menyatakan



kolaborasi dengan industri adalah langkah konkret untuk memperkuat fondasi pers nasional di tengah tantangan transformasi digital. Saat ini, pers membutuhkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. “Kerja sama ini bukan untuk mengurangi independensi pers, tetapi justru untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme insan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi publik,” kata mantan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia ini.

Pada puncak perayaan HPN 2026, insan pers menyerahkan Anugerah Jurnalistik Adinegoro kepada wartawan terbaik dari berbagai kategori serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menko PKM Muhaimin Iskandar yang didampingi oleh Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat serta Ketua PWI Pusat Akhmad Munir. ■

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DI INDUSTRI SAWIT

Penguatan kapasitas pekerja perempuan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Pekerja perempuan di kebun sawit menjadi topik menarik karena perlindungan pada mereka bukan sekadar kewajiban perusahaan, namun menjadi tuntutan global. Aspek kemanusiaan dalam perlindungan pekerja perempuan sangat kuat. Untuk mewujudkan perlindungan yang maksimal dan memperkuat kesetaraan gender, GAPKI mengadakan forum bertajuk *Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit*.

Kegiatan yang didukung oleh BPDP ini diselenggarakan di Palu pada 11-12 Februari 2026 dan diikuti oleh 140 peserta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. Mereka berasal dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan sawit, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, perwakilan petani, dan media. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi dan

merumuskan langkah konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat perusahaan dan pemerintah daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutan yang dibacakan Plh Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus Abdul Karim mengatakan perlindungan pekerja perempuan harus menjadi komitmen bersama. "Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama," kata Gubernur Anwar Hafid. Gubernur berharap pertemuan ini melahirkan langkah konkret supaya pekerja perempuan merasa aman, terlindungi, dan dihargai di tempat kerja.

Menurut Ketua GAPKI Cabang Sulawesi Dony Yoga Pratama, jumlah pekerja perempuan di industri kelapa sawit di Sulawesi mencapai 10,68% dari total karyawan tetap. Peran mereka sangat penting, terutama dalam pengelolaan kebun sawit yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kejelian. Karena itu, GAPKI terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Dalam forum ini, pemateri memperkenalkan *Panduan Praktis*

Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit. Panduan ini sudah disesuaikan dengan regulasi nasional dan standar internasional. Sedangkan tema yang dibahas antara lain perlindungan maternitas dan hak reproduksi, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), status kerja dan sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola dan proses audit.

Dony mengatakan penguatan kapasitas pekerja perempuan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesetaraan gender di kebun sawit. Karena itu, GAPKI mendorong peningkatan kompetensi pekerja perempuan. Begitu juga dengan kapasitas perusahaan, dan pemangku kepentingan di sektor sawit.

Menurut Dony, forum ini diharapkan menjadi momentum penguatan perlindungan pekerja perempuan secara konkret di lapangan. "Supaya tidak hanya menjadi wacana," katanya. Komitmen kesetaraan gender ini harus terintegrasi dalam praktik operasional perusahaan sawit. Langkah ini penting untuk memastikan industri sawit Indonesia makin berkelanjutan, inklusif, menjamin kesetaraan gender dan berdaya saing global. ■



GAPKI DUKUNG KEGIATAN SAWIT BERBAGI FORWATAN

“Prinsip kami rezeki yang didapatkan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dibagikan kepada masyarakat.”

GAPKI berkomitmen terus memberikan dukungan kepada komunitas profesi dalam kegiatan sosial sebagai bagian dari kehadiran asosiasi pengusaha sawit di tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang didukung adalah *Sawit Berbagi, Ramadhan Penuh Makna* yang diadakan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Depok, Jawa Barat, 4 Maret 2026. Beberapa anggota GAPKI seperti PT Astra Agro Lestari Tbk, Apical, dan Wilmar Group berpartisipasi aktif dengan program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya.

Ketua Umum Forwatan, Beledug Bantolo mengatakan kegiatan tahunan di bulan Ramadan ini merupakan implementasi nilai-nilai sosial dan kebersamaan industri sawit dan Forwatan. “Industri sawit tidak hanya tentang bisnis, namun juga kepedulian sosial kepada sesama,” kata Redaktur Pelaksana Agrofarm ini. Karena itu, kegiatan sosial ini diwujudkan dalam rupa silaturahmi, literasi tentang komoditas sawit, dan pemberian santunan sembako kepada beberapa panti asuhan.

Menurut Bantolo, masyarakat perlu mendapat informasi yang komprehensif tentang sawit sehingga memiliki pemahaman yang tidak bias. Dengan pemahaman yang baik, informasi negatif tentang dapat difilter dengan sendirinya. Apalagi komoditas sawit memberi manfaat yang besar bagi perekonomian negara.



Data Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa nilai ekonomi sektor hilir sawit mencapai Rp 750 triliun atau 3,5% dari PDB Indonesia.

Kompartemen Media Relations GAPKI, Mochamad Husni, menjelaskan industri sawit tetap berkomitmen menjalankan program CSR untuk mendukung masyarakat sekitar. Dukungan ini diwujudkan dalam empat sektor yakni pendidikan, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

“Jadi, kami tidak hanya mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng, sabun, mentega, atau pasta gigi,” katanya. Pemberdayaan masyarakat dengan empat sektor itu dijalankan bersama pengelolaan usaha perusahaan.

Menurut Mochamad Husni, hasil usaha komoditas sawit tidak hanya untuk perusahaan, tapi dibagikan agar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak sebagai bagian dari berkah yang disyukuri. Karena itu, kegiatan sosial perusahaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan sawit.



“Prinsip kami bahwa rezeki yang didapatkan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga harus dibagikan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Riyadhush Sholihin Kelurahan Kebayunan Kecamatan Tapos Kota Depok, KH Bahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Forwatan dan perusahaan sawit kepada anak-anak yatim asuhannya.

“Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua serta dilancarkan setiap urusan kita,” katanya. Ia juga berharap doa dan dukungan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak yatim untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

Pondok Pesantren Panti Asuhan Riyadhush Sholihin merupakan lembaga dan pemberdayaan yang didirikan secara mandiri oleh KH Moh. Yasin untuk mengasuh anak yatim piatu. Panti ini menampung dan mengasuh 98 orang anak yatim, piatu, dan dhuafa. ■

MERAWAT TRADISI BUKA PUASA BERSAMA

“Industri sawit kita masih dalam kondisi yang solid namun dalam tekanan yang kompleks.”

Buka puasa bersama menjadi tradisi yang terus diselenggarakan oleh GAPKI setiap bulan Ramadan. Acaranya bukan hanya membatalkan puasa dan makan bersama, namun punya makna lebih mendalam. Selain menjaga kebersamaan, kegiatan ini juga untuk menguatkan soliditas organisasi dan relasinya dengan pihak lainnya. Karena itu, agenda ini menjadi salah satu forum refleksi sekaligus presentasi kondisi terkini industri sawit.

“Industri sawit kita masih dalam kondisi yang solid namun dalam tekanan yang kompleks,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam *Konferensi Pers dan Buka Puasa Bersama GAPKI* di Jakarta pada 12 Maret 2026. Acara ini dihadiri pengurus GAPKI, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, perwakilan pemerintah, akademisi, pengamat, dan media.

Dalam presentasi industri sawit, Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng mengatakan secara umum kinerja industri sawit nasional tahun 2025 menunjukkan tren positif. Produksi minyak sawit meningkat sekitar 7%, dengan total produksi mencapai 56 juta ton. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 5%. Permintaan global tumbuh positif. “Untuk ekspor, alhamdulillah tumbuh 9,5 persen,” katanya. Nilai eksportnya mencapai USD 35,87 miliar



atau setara Rp 590 triliun.

Meski demikian, tekanan terhadap industri sawit semakin kompleks. Konflik Timur Tengah membuat biaya logistik melonjak akibat penutupan Selat Hormuz. Pengiriman barang harus memutar melalui Cape Town di Afrika Selatan.

“Biaya logistik naik sangat tinggi. *Freight dan insurance* bisa naik sampai 50 persen. Ini menjadi tekanan besar bagi ekspor kita,” kata Eddy Martono. Tantangan lainnya adalah regulasi EUDR yang berpotensi menghambat ekspor.

Menurut Eddy Martono, tantangan industri sawit juga datang dari dalam negeri antara lain penertiban kawasan hutan. Berdasarkan data GAPKI, sampai saat ini sekitar 1,2 juta hektar lahan sawit telah diambilalih oleh negara dari total 4,2 juta hektar yang dikategorikan oleh pemerintah berada di kawasan hutan.

Kebijakan ini mengundang banyak pertanyaan terkait kelanjutan produksi sawit. “Apakah berpengaruh terhadap

produksi atau tidak kita harus melihat bagaimana pengelolaannya,” katanya.

GAPKI juga menyoroti rencana sejumlah daerah menerapkan Pajak Air Permukaan (PAP) per pokok tanaman kelapa sawit. Dalam kajian rencana ini, setiap pohon sawit dikenakan pajak Rp 1.700 per bulan untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Yang dibutuhkan oleh industri sawit adalah penyederhanaan pungutan,” katanya. GAPKI berharap pajak, retribusi, hingga pungutan lainnya dapat dirapikan kembali.

GAPKI berharap berbagai tantangan ini membuat industri sawit semakin kokoh dan tidak surut langkah. Sebab, industri ini merupakan penopang perekonomian nasional yang telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai situasi. Bahkan, dalam kondisi krisis, industri ini menjadi tumpuan perekonomian nasional. “Semoga kita semua bisa menghadapi krisis ini dengan baik, artinya kapal kita tidak sampai tenggelam,” katanya. ■





PERAYAAN SEDERHANA ULANG TAHUN GAPKI

“Kami yakin industri ini memiliki masa depan yang kuat selama persoalan mendasar dapat segera diselesaikan.”

Selama empat dekade lebih GAPKI berkiprah dan berkontribusi sehingga Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Pada 27 Februari 2026, usia GAPKI menapaki 45 tahun dihitung sejak kelahirannya pada 27 Februari 1981 di Medan. Diinisiasi oleh beberapa perusahaan kelapa sawit, GAPKI tumbuh menjadi wadah strategis bagi pekebun sawit dalam mengembangkan industri kelapa sawit di Tanah Air. Dari rata-rata produksi tahunan 230 ribu ton pada dekade 1980-an, produksi sawit mencapai 56,55 juta ton pada tahun 2025 dengan nilai ekspor USD 35,87 miliar, setara Rp 590 triliun.

Industri sawit berkembang menjadi tumpuan bangsa Indonesia. Peluang untuk berkembang lebih besar terbuka sangat lebar. Namun, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. “Kita sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Namun, kita tetap optimistis menghadapi kondisi ini,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam Buka Puasa Bersama sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-45 GAPKI di Hotel Shangri-La Jakarta pada 12 Maret 2026.

Tantangan industri kelapa sawit yang kompleks berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Gejolak geopolitik konflik di Timur Tengah menambah panjang daftar tantangan global yang harus dihadapi industri ini. Begitu juga dengan EUDR yang mempengaruhi daya saing sawit di pasar global. Namun, setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Penerapan EUDR misalnya, justru mendorong percepatan penerapan sistem ketelusuran (*traceability*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Kemampuan sektor sawit bertahan dalam berbagai situasi menjadi bukti industri ini adaptif dengan perubahan. Karena itu, potensi sawit untuk berkembang menjadi sektor andalan perekonomian negara semakin nyata. Ketergantungan pasar global terhadap sektor sawit juga tidak dapat diingkari. “Industri sawit harus dilihat sebagai aset strategis bangsa yang membutuhkan kepastian hukum,” kata Eddy Martono.

GAPKI akan terus memupuk sikap optimistis dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. “Kami yakin industri ini memiliki masa depan yang kuat selama persoalan mendasar

dapat segera diselesaikan,” katanya. Hari Ulang Tahun ke-45 GAPKI ini menjadi momentum meneguhkan keyakinan tentang masa depan industri sawit yang lebih baik.

Harapan industri sawit semakin berkibar di masa depan juga disampaikan para Pengurus GAPKI Cabang se-Indonesia. “Para pelaku usaha sawit harus lebih kompak dan bersinergi,” kata Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat Aris Supratman dalam Buka Puasa Bersama dan Peringatan HUT ke-45 GAPKI di Hotel Mercure Pontianak, 27 Februari 2026. Dia mendorong GAPKI dan pemerintah meningkatkan sinergi untuk mencari peluang supaya industri sawit tumbuh dan berkembang lebih besar lagi.

Ketua GAPKI Cabang Riau, Lichwan Hartono juga menaruh harapan serupa. Peringatan HUT ke-45 GAPKI berlangsung sederhana bersama perwakilan pemerintah dan insan media. Kepada GAPKI Cabang Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi memberikan apresiasi khusus kontribusi GAPKI selama 45 tahun mendorong industri sawit, terutama di Riau sebagai salah satu sentra sawit nasional. ■

PENINGKATAN PAD HARUS REALISTIS, SESUAI KONDISI LAPANGAN



Dalam rancangan ini, setiap batang tanaman sawit dikenai PAP Rp 1.750 per bulan.

GAPKI Riau mendukung upaya pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan yang diambil harus realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua GAPKI Riau Hendryx Wahyudi dalam diskusi publik dengan tema *Pajak Air Permukaan (PAP): Jawaban Defisit Anggaran atau Jalan Menuju Keadilan Ekonomi* yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau di Pekanbaru pada 27 Februari 2026.

Hendryx mengkritisi usulan Pemerintah Provinsi Riau tentang Pajak Air Permukaan (PAP) dari tanaman sawit. Dalam rancangan peraturan ini, setiap batang tanaman sawit dikenai PAP sebesar Rp 1.750 per bulan. Rancangan kebijakan ini sedang dimatangkan oleh Pansus Optimalisasi PAD DPRD Provinsi Riau. Dalam hitungan Pansus, kebijakan ini mendatangkan ratusan miliar pendapatan asli daerah. Riau adalah daerah dengan lahan sawit mencapai 1,5 juta hektar.

"Kami mendukung potensi yang dapat digali untuk PAD, namun harus



realistis. Sawit tidak menggunakan air permukaan. Istilah air permukaan tidak pas untuk sawit," kata Hendryx. Air permukaan tidak digunakan di kebun sawit. Air permukaan digunakan oleh perusahaan untuk operasional pabrik atau pembibitan. "Untuk air permukaan ini saya yakin perusahaan sudah bayar pajak," katanya.

Pakar lingkungan dan kehutanan IPB, Sudarsono Soedomo mengatakan tanaman sawit tidak mengambil air permukaan. Sawit menunggu air hujan yang terserap dan tersimpan di dalam tanah. Dalam perspektif hidrologi, *green water* dan *blue water* berbeda. *Green water* adalah air hujan yang tersimpan di tanah dan digunakan langsung oleh tanaman. Sedangkan *blue water* adalah air permukaan di sungai, danau, atau waduk yang menjadi obyek PAP.

Menurut Hendryx, industri kelapa sawit selama ini sudah membayar pajak dan beberapa kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Dari ujung ke ujung sudah kita bayar pajak," katanya. Pajak yang



ditanggung industri sawit antara lain kebijakan DMO untuk minyak goreng, pungutan ekspor, Pajak Pertambahan Nilai, hingga berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPH) seperti PPh 21, PPh 23, dan PPh 24.

Hendryx mengatakan saat ini industri kelapa sawit sudah tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Contohnya, pupuk di mana komoditas sawit tidak mendapatkan pupuk subsidi seperti petani komoditas lainnya. Karena itu, dia berharap industri sawit tidak ditambahi beban-beban baru yang justru membuat industri ini sulit berkembang. Apabila industri sawit tidak tumbuh, dampaknya terhadap perekonomian dan lapangan kerja.

Meskipun mengkritisi rencana kebijakan PAP pada tanaman sawit, GAPKI Cabang Riau tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. "Kami yakin perusahaan sawit siap mendukung Riau untuk memastikan PAD kita baik. Apapun bentuk pajak atau retribusinya, kami upayakan untuk membayar," katanya. ■

GAPKI KALTENG PERKUAT SINERGI DENGAN MEDIA



“Sinergi dengan industri kita harapkan pada aspek yang lebih substantif dan tidak hanya seremonial.”

GAPKI Cabang Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendukung pembangunan daerah masing-masing. Penguatan sinergi ini dicanangkan dalam Buka Puasa Bersama pada 27 Februari 2026 di Sampit, Kalimantan Tengah. Buka puasa ini dihadiri oleh pengurus GAPKI Kalteng, perwakilan perusahaan besar di Kalimantan Tengah dan wartawan anggota PWI Kotawaringin Timur.

“Kolaborasi dengan PWI sangat penting karena masukan dari media dalam menjadi bahan untuk evaluasi kita semua,” kata Pelaksana Tugas Ketua GAPKI Cabang Kalteng Rizky Djaya. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong media massa di Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Kotawaringin Timur membangun komunikasi yang konstruktif untuk kemajuan daerah, terutama industri kelapa sawit. Kerjasama antara GAPKI Kalteng dan insan media yang sudah terjalin

selama ini diharapkan semakin positif.

Menurut Rizky Djaya, industri kelapa sawit memegang peran penting dalam perekonomian Kalimantan Tengah. Apalagi provinsi ini termasuk daerah utama penghasil komoditas sawit di Indonesia. Karena itu, keberlangsungan industri ini berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat. “Kontribusi kelapa sawit sangat besar terhadap pembangunan daerah,” katanya. Karena itu, setiap pihak diharapkan dapat menjaga dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri ini.

Saat ini, industri kelapa sawit menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya adalah masalah keamanan. “Peran pers sangat besar dalam memberi informasi pentingnya sektor sawit sehingga dapat menjaga komoditas ini bersama,” katanya. Bagi GAPKI, informasi yang disampaikan media juga menjadi masukan rangka perbaikan dan peningkatan. GAPKI yakin PWI mampu menelaah dan

menyampaikan informasi yang baik untuk kemajuan daerah.

Ketua PWI Kabupaten Kotawaringin Timur, Siti Fauziah mengatakan keterbukaan informasi dan transparansi industri berkontribusi besar terhadap edukasi masyarakat melalui media. Karena itu, PWI Kotawaringin Timur berkomitmen untuk menyampaikan informasi akurat, berimbang sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. “Media juga dapat berperan sebagai mitra dalam pembangunan daerah,” katanya.

PWI Kotawaringin Timur berharap kerjasama dan sinergi dengan GAPKI Kalimantan Tengah dapat dikembangkan menjadi sinergi yang semakin positif dan konstruktif. “Sinergi dengan industri kita harapkan pada aspek yang lebih substantif dan tidak hanya seremonial,” kata Siti Fauziah. Kolaborasi dengan kokoh diharapkan dapat menjadi kontribusi bersama untuk pembangunan dan kemajuan daerah, terutama di Kotawaringin Timur. ■

SOLIDITAS ORGANISASI JADI FOKUS PROGRAM GAPKI SUMBAR



Perkebunan kelapa sawit terbanyak berada di Kabupaten Pasaman.

GAPKI Cabang Sumatera Barat berfokus pada peningkatan sinergi dan soliditas anggota dalam menjalankan program kerja tahun 2026. Penguatan soliditas ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) GAPKI Sumatera Barat di Padang pada 12 Februari 2026 yang diikuti 11 anggota GAPKI Sumatera Barat. Raker ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija Budi Wibawa, Ketua Bidang Organisasi Dwi Dharmawan, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, dan Sekretariat GAPKI Diah Ayuning Novianto.

Wakil Ketua Umum III Satrija Budi Wibawa mengapresiasi rapat kerja ini untuk menindaklanjuti hasil Rakernas GAPKI tahun 2025 di Surabaya. Apalagi banyak isu strategis yang membutuhkan perhatian GAPKI Cabang, terutama peranan dan fungsi organisasi serta sinkronisasi dengan kebijakan GAPKI Pusat. Isu yang membutuhkan perhatian antara lain penyelesaian kebun sawit yang teridentifikasi dalam kawasan hutan, kewajiban FPKMS 20%, kenaikan pajak, pungutan dan retribusi daerah, serta pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dan PKS brondolan.

Menurut Satrija Budi Wibawa, GAPKI Pusat telah melaksanakan

advokasi kepada pemerintah agar denda terkait kebun sawit terindikasi di kawasan hutan jumlahnya proporsional.

Jangan sampai memberatkan, apalagi mematikan keberlanjutan usaha. Selain itu, GAPKI Sumatera Barat diharapkan memberdayakan pihak terkait seperti petani dan serikat pekerja melalui penguatan komunikasi intensif dan litigasi yang terukur. GAPKI Sumatera Barat diharapkan makin berkembang sehingga kontribusi kepada daerah semakin besar.

Ketua GAPKI Cabang Sumatera Barat, Lichwan Hartono mengatakan rapat kerja ini dihadiri oleh 11 dari 20 anggota GAPKI Sumatera Barat.

Program kerja tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik, antara lain pendampingan anggota dalam penyelesaian masalah lahan, pendataan potensi PSR di enam kabupaten, FGD bersama Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik tentang kebun sawit di Sumatera Barat, dan penyaluran bantuan korban bencana hidrometeorologi. "Khusus untuk jumlah anggota, belum ada penambahan anggota baru," katanya.

Saat ini terdapat 48 perusahaan sawit di Sumatera Barat. Sebanyak

20 perusahaan merupakan anggota GAPKI Sumatera Barat dengan total luas lahan 110.109,50 hektar. Perkebunan kelapa sawit terbanyak berada di Kabupaten Pasaman. GAPKI Sumatera Barat akan merampungkan pendataan potensi PSR Jalur Kemitraan di Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Agam, Sijunjung, dan Solok Selatan. Implementasi PSR masih perlu peningkatan untuk mendukung pencapaian target PSR oleh pemerintah.

Lichwan Hartono mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan advokasi bagi anggota yang mengalami berbagai masalah. Karena itu, koordinasi dengan lembaga dan instansi yang terkait di Provinsi Riau harus terus dijalin. Rakercab 2026 diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjalankan program kerja 2026. Selain itu, soliditas dan solidaritas antar anggota diharapkan semakin meningkat sehingga keberadaan organisasi semakin dirasakan manfaatnya. Dengan bekal ini, keberlanjutan industri sawit di Sumatera Barat semakin kuat dan GAPKI Sumatera Barat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. ■



GAPKI RIAU KEMBANGKAN KAPASITAS SDM BIDANG KEHUMASAN



“Setiap pernyataan bisa menjadi solusi, namun satu kalimat yang salah dapat berkembang menjadi krisis,”

Sebagai daerah utama penghasil komoditas kelapa sawit, pelaku usaha sawit di Provinsi Riau dituntut mampu membangun relasi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat dengan baik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkala. Karena itu, GAPKI Cabang Riau mengadakan pelatihan *Peningkatan Kompetensi Humas / Community Development / Legal dalam Sinergi dengan Media, Motivasi Kerja, dan Public Speaking* di The Zuri Hotel, Pekanbaru pada 12 Februari 2026.

Materi pelatihan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang dan Direktur MF Communications Michiko Frizdew yang dipandu oleh Ketua Kompartemen Publikasi dan CSR GAPKI Cabang Riau Muchlisin. Zulmansyah menyampaikan materi tentang pentingnya relasi strategis dengan media melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Sedangkan Michiko Frizdew membahas teknik *public speaking* dan strategi komunikasi efektif di ruang publik, termasuk aspek hukum dalam setiap pernyataan kepada publik.

Ketua GAPKI Cabang Riau, Lichwan Hartono, mengatakan kompetensi

dalam penyampaian informasi sangat penting di era keterbukaan informasi. Apalagi informasi tentang kelapa sawit. Peranan humas, *comdev*, dan legal sangat penting untuk membangun reputasi sawit melalui penyampaian informasi yang akurat, berbasis data, dan sesuai fakta. Komunikasi yang jelas dan *clear* dapat mencegah salah persepsi tentang informasi yang disampaikan yang merugikan perusahaan dan industri sawit. “Humas merupakan wajah perusahaan di ruang publik,” kata Lichwan Hartono. Sedangkan *community development* adalah jembatan kepercayaan dengan masyarakat. Adapun aspek legal sebagai fondasi kepastian dan

perlindungan hukum. “Ketiganya harus bergerak dalam satu irama,” katanya dalam sambutan pelatihan. Dalam sebuah organisasi, ketiga aspek ini harus berjalan selaras melalui sinergi antarfungsi dalam organisasi.

Lichwan Hartono mengatakan bahwa komunikasi yang efektif tidak sekadar bertumpu pada kemampuan berbicara, namun juga harus berbasis data, fakta, dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena itu, pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh publik. “Setiap pernyataan bisa menjadi solusi, namun satu kalimat yang salah dapat berkembang menjadi krisis,” katanya.

Mengingat penting dan vitalnya kompetensi kehumasan, *comdev*, dan legal, GAPKI Cabang Riau berusaha meningkatkan kapasitas SDM di bidang ini. Apalagi, pelatihan ini bukan hanya tentang teknik berbicara, tetapi juga membangun kredibilitas serta menjaga reputasi industri secara kolektif. Kompetensi kehumasan yang baik diharapkan mampu membangun relasi strategis dengan media untuk memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat.

Untuk mendorong motivasi peserta dalam pengembangan kapasitas di bidang kehumasan ini, GAPKI Cabang Riau juga menghadirkan Tahidin mas’ud. Dia seorang motivator yang berfokus pada penguatan motivasi kerja dan mentalitas profesional. ■



ANWAR JIBE TERPILIH SEBAGAI KETUA GAPKI BENGKULU

Bengkulu termasuk salah satu daerah penghasil sawit utama di pulau Sumatera.

Anggota GAPKI Cabang Bengkulu memberi kepercayaan kepada Anwar Jibe untuk menjadi nakhoda organisasi dalam lima tahun mendatang. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablu) di Kantor Sekretaris GAPKI Bengkulu pada 4 Maret 2026. Pelantikan dan pengukuhan Anwar Jibe sebagai Ketua GAPKI Bengkulu dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono pada hari yang sama.

Di depan pengurus GAPKI Pusat antara lain Ketua Umum Eddy Martono dan Sekretaris Jenderal M. Hadi Sugeng, Anwar Jibe menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif dengan semua sektor di Bengkulu. "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin GAPKI Bengkulu lima tahun



ke depan," katanya. Komunikasi menjadi salah satu komitmen yang ingin dibangun di tubuh GAPKI untuk menegaskan keberadaan organisasi kepada anggota maupun masyarakat.

Selain penguatan komunikasi, Anwar Jibe akan memperkuat soliditas organisasi untuk mendorong perkembangan industri sawit di Bengkulu. Sejauh ini, kontribusi sektor sawit cukup signifikan bagi pertumbuhan daerah, terutama dari penyerapan tenaga kerja. "Kami mengajak pelaku usaha sawit bergandengan tangan agar industri sawit berkelanjutan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat," katanya. Bengkulu termasuk salah satu daerah penghasil sawit utama di pulau Sumatera.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kelapa sawit merupakan komoditas utama di Bengkulu dengan luas lahan mencapai 424,53 ribu hektar. Luas lahan ini jauh melampaui

komoditas lain seperti kopi, karet, dan lainnya. Tidak mengherankan apabila sektor sawit menjadi penopang utama perekonomian provinsi di pantai barat pulau Sumatera ini. "Sawit sudah berkontribusi selama puluhan tahun terhadap masyarakat Bengkulu," katanya.

Dalam sambutan pelantikan pengurus GAPKI Bengkulu 2026-2031, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono berharap terpilihnya Anwar Jibe dapat memperkuat organisasi pengusaha kelapa sawit ini di Bengkulu. Salah satunya dengan menjaga kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai mitra GAPKI Bengkulu. Terutama yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah sentra sawit. "GAPKI cabang harus berperan aktif dalam pembangunan daerah," katanya.

Pengurus GAPKI Cabang Bengkulu diajak untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sinergi dibangun dengan memperkuat komunikasi dan memperjuangkan beragam kepentingan komoditas kelapa sawit di daerah.

"Kami akan membangun komunikasi terkait kendala perkelapa sawitan. Itu yang menjadi prioritas utama kami," ujar Anwar Jibe. ■

